

Kebijakan Fiskal dan Moneter Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Perekonomian Tahun 2024

**Efa Liyana Halim¹, Icha Asaroh², Ainul Yaqin Al Haris³,
Rendi Adi Prasetyo⁴, Gama Pratama⁵**

¹²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email: efalhalim58@gmail.com¹, icaasaroh@gmail.com², aenulyaqin837@gmail.com³,
gamapratama0@gmail.com⁵

Received: 2025-10-25; Accepted: 2025-11-20; Published: 2025-12-30

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia tahun 2024. Pasca-pandemi, Indonesia menghadapi tantangan inflasi pangan, fluktuasi nilai tukar, dan perlambatan ekonomi global. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis data sekunder dari BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Hasil menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% dengan inflasi terkendali 2,8%. Kebijakan fiskal ekspansif melalui APBN berhasil menjaga defisit di bawah 3% PDB, sementara kebijakan moneter mendukung stabilitas nilai tukar. Studi kasus kenaikan harga beras membuktikan efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dalam menjaga daya beli masyarakat. Sinergi kedua kebijakan menjadi kunci ketahanan ekonomi, meskipun tantangan struktural masih memerlukan perhatian.

Kata Kunci: *kebijakan fiskal, kebijakan moneter, stabilitas ekonomi, inflasi, Indonesia*

ABSTRACT

This study examines the implementation of fiscal and monetary policies to maintain Indonesian economic stability in 2024. Post-pandemic, Indonesia faces the challenges of food inflation, exchange rate fluctuations, and a global economic slowdown. A

qualitative descriptive method with a case study approach was used to analyze secondary data from Statistics Indonesia (BPS), Bank Indonesia, and the Ministry of Finance. The results show economic growth reached 5.11% with controlled inflation at 2.8%. Expansionary fiscal policy through the State Budget (APBN) successfully kept the deficit below 3% of GDP, while monetary policy supported exchange rate stability. The case study of the increase in rice prices demonstrates the effectiveness of the Food Supply and Price Stabilization program in maintaining public purchasing power. The synergy between the two policies is key to economic resilience, although structural challenges still require attention.

Keywords: *fiscal policy, monetary policy, economic stability, inflation, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia beroperasi di persimpangan dua tantangan besar: (1) kebutuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memitigasi perlambatan global pasca-pandemi, dan (2) mempertahankan kestabilan makroekonomi (inflasi, nilai tukar, neraca pembayaran, dan posisi fiskal) di tengah tekanan eksternal. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjalankan kebijakan fiskal dan moneter secara responsif untuk menyeimbangkan tujuan ganda tersebut.

Secara fiskal, pemerintah menggunakan APBN 2024 untuk mendukung prioritas pembangunan—infrastruktur, program sosial, dan stimulus konsumsi musiman—sambil menjaga defisit dalam kerangka yang dianggap aman bagi stabilitas jangka menengah. Realisasi pendapatan dan belanja negara sepanjang tahun menunjukkan fokus pada belanja pembangunan sekaligus penanganan tekanan sosial-ekonomi, sehingga manajemen defisit dan sumber pembiayaan menjadi isu utama kebijakan fiskal.

Di sisi moneter, Bank Indonesia menavigasi trade-off antara mendukung pertumbuhan dan memelihara stabilitas nilai tukar serta mengendalikan inflasi. Periode 2024 mencatat beberapa penyesuaian kebijakan suku bunga: BI sempat menaikkan suku bunga pada kuartal II (reaksi terhadap tekanan nilai tukar dan inflasi), kemudian melonggarkan sedikit pada kuartal III yang tercermin pada penurunan BI-Rate di September, dan mempertahankan tingkat suku bunga pada pertemuan akhir tahun. Kebijakan suku bunga ini juga dipengaruhi oleh dinamika suku bunga global dan aliran modal internasional

Dari sisi hasil, indikator-indikator makro memberikan gambaran mixed: pertumbuhan ekonomi 2024 berada di kisaran ~5% (menunjukkan kelanjutan pemulihan tetapi lebih moderat dibandingkan target ambisius pemerintahan baru), inflasi sepanjang 2024 relatif rendah dan berada dalam sasaran BI, sementara posisi eksternal mengalami pelebaran defisit transaksi berjalan pada 2024 yang menimbulkan kewaspadaan terhadap tekanan nilai tukar dan ruang kebijakan moneter/fiskal di masa depan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan menunjukkan

perbaikan bertahap, tetapi kualitas lapangan kerja dan tekanan pada daya beli menjadi alasan kuat bagi stimulus fiskal bersyarat. (BPS, 2024)

Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat fundamental bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks ekonomi modern, stabilitas ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mencakup pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, serta ketahanan terhadap gejolak ekonomi eksternal. Pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola perekonomian melalui instrumen kebijakan makro yang tepat dan terukur. Dua instrumen utama yang digunakan adalah kebijakan fiskal yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, serta kebijakan moneter yang mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga (Warjiyo & Juhro, 2020). Kedua instrumen ini harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan ekonomi nasional yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, keseimbangan neraca pembayaran, dan pemerataan pendapatan.

Perekonomian Indonesia pasca-pandemi COVID-19 menunjukkan pemulihan yang menggembirakan dan mencerminkan ketahanan ekonomi domestik. Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2024 mencapai 5,11%, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, serta kinerja ekspor yang mulai pulih. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar dalam struktur ekonomi Indonesia tetap menjadi penopang utama pertumbuhan, menunjukkan daya beli masyarakat yang terjaga. Namun, di balik capaian positif ini, berbagai tantangan ekonomi masih menghadang dan memerlukan penanganan kebijakan yang cermat. Tekanan inflasi pangan akibat fenomena iklim El Niño yang menyebabkan gangguan produksi pertanian, melemahnya nilai tukar rupiah hingga Rp15.700 per USD yang memberikan tekanan pada biaya impor dan pembayaran utang luar negeri, serta perlambatan ekonomi mitra dagang utama seperti Tiongkok dan negara-negara maju lainnya menjadi perhatian serius pemerintah (Saefudin, 2023).

Kondisi ekonomi yang kompleks ini menuntut pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang adaptif, terukur, dan berbasis data. Kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi domestik dan global menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mengendalikan risiko-risiko ekonomi. Melalui program APBN untuk Transformasi Ekonomi, pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3% PDB sambil mendorong pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik, serta mempercepat program hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia. Di sisi lain, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing dan mendorong pembiayaan inklusif bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2024). Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter ini menjadi sangat krusial dalam memastikan kebijakan yang diambil saling mendukung dan tidak kontraproduktif.

Penelitian ini penting karena memberikan analisis komprehensif tentang efektivitas implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam konteks tantangan ekonomi terkini yang dihadapi Indonesia. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung bersifat teoritis atau menggunakan data historis, penelitian ini menggunakan data aktual tahun 2024 untuk menganalisis respons kebijakan terhadap kondisi riil perekonomian. Kajian mendalam terhadap kasus nyata seperti penanganan inflasi pangan, khususnya lonjakan harga beras yang sempat mengancam daya beli masyarakat, diharapkan memberikan pembelajaran berharga bagi perumusan kebijakan ekonomi ke depan. Studi kasus ini juga menunjukkan bagaimana koordinasi antarinstansi pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi sektoral dapat memberikan hasil yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia tahun 2024 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kedua, bagaimana implementasi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan yang ada. Ketiga, bagaimana efektivitas kebijakan dalam mengatasi inflasi pangan sebagai salah satu ancaman utama terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis kondisi perekonomian Indonesia dan faktor-faktor pengaruhnya untuk memahami dinamika ekonomi secara komprehensif. Kedua, mengkaji implementasi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah beserta instrumen-instrumen yang digunakan dalam merespons kondisi ekonomi. Ketiga, mengevaluasi efektivitas kebijakan melalui studi kasus inflasi pangan untuk memberikan bukti empiris tentang keberhasilan atau tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis bagi pengambilan keputusan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji fenomena ekonomi secara mendalam dan komprehensif. Sudha, (2017) menjelaskan Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, proses, dan makna dari implementasi kebijakan ekonomi dalam situasi nyata. (Fadli, 2021) menjelaskan bahwa jenis penelitian adalah studi kasus yang mengkaji implementasi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah Indonesia dalam konteks perekonomian tahun 2024, khususnya dalam menangani inflasi pangan sebagai salah satu tantangan ekonomi utama. Studi kasus dipandang tepat karena memungkinkan analisis yang detail dan kontekstual terhadap fenomena kompleks dalam setting kehidupan nyata.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan terpercaya untuk memastikan validitas dan

reliabilitas informasi. Sumber data meliputi publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan berbagai indikator ekonomi makro tahun 2024 yang dirilis secara berkala. Laporan Bank Indonesia tentang kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan yang mencakup analisis mendalam tentang kondisi likuiditas, nilai tukar, dan perkembangan sektor keuangan juga menjadi sumber penting. Dokumen Kementerian Keuangan RI mengenai pelaksanaan APBN dan kebijakan fiskal memberikan informasi detail tentang realisasi penerimaan dan belanja negara serta arah kebijakan fiskal. Laporan Kementerian Perdagangan RI tentang perkembangan harga pangan khususnya terkait komoditas strategis seperti beras, daging, dan bahan pangan lainnya digunakan untuk analisis studi kasus. Publikasi World Bank tentang prospek ekonomi Indonesia memberikan perspektif komparatif dan analisis dari lembaga internasional. Penggunaan sumber data yang beragam ini bertujuan untuk melakukan triangulasi data dan memastikan objektivitas analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji berbagai publikasi resmi, laporan tahunan, dokumen kebijakan pemerintah, serta berita dan informasi resmi dari lembaga-lembaga pemerintah terkait. Data yang dikumpulkan mencakup periode tahun 2024 untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi terkini, dengan beberapa data komparatif tahun sebelumnya untuk memberikan konteks perbandingan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengakses, dan mendokumentasikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Setiap data yang dikumpulkan dicatat sumbernya secara lengkap untuk memudahkan penelusuran kembali dan memastikan akuntabilitas penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan sistematis. (Dr. Umar Sidiq, et al., 2019) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan. Tahap pertama adalah pengumpulan data dari berbagai sumber resmi yang telah disebutkan sebelumnya. Tahap kedua adalah reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, mengeliminasi data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data berdasarkan kategori tertentu. Tahap ketiga adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel yang memudahkan pemahaman pembaca terhadap temuan penelitian. Tahap keempat adalah analisis hubungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan indikator ekonomi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kausalitas antar variabel. Tahap kelima adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan analisis dengan mempertimbangkan konteks ekonomi, teori yang relevan, dan implikasi kebijakan. Proses analisis ini dilakukan secara iteratif, di mana peneliti bolak-balik antara data dan interpretasi untuk memastikan kedalaman dan ketepatan analisis. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, analisis juga mempertimbangkan perspektif berbagai

pemangku kepentingan dan membandingkan temuan dengan hasil penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya "The General Theory of Employment, Interest and Money" yang diterbitkan tahun 1936, di mana Keynes menekankan peran aktif pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi, khususnya dalam kondisi resesi atau depresi ekonomi (Mankiw, 2020). Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu mampu mencapai keseimbangan penuh kesempatan kerja secara otomatis, sehingga intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal menjadi penting untuk menstimulasi permintaan agregat dan menciptakan multiplier effect dalam perekonomian.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memiliki tiga fungsi utama yang saling berkaitan. Pertama, fungsi alokasi yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Kedua, fungsi distribusi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Ketiga, fungsi stabilisasi yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro melalui pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, dan pemeliharaan keseimbangan neraca pembayaran.

Instrumen utama kebijakan fiskal meliputi perpajakan dan belanja pemerintah yang dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kondisi ekonomi. (Sudirman, 2017) menjelaskan bahwa pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja publik atau menurunkan tarif pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama ketika ekonomi mengalami resesi atau pertumbuhan yang melambat. Kebijakan ekspansif ini bekerja melalui peningkatan permintaan agregat yang selanjutnya mendorong produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan melalui pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan tarif pajak untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi tekanan pada neraca pembayaran ketika ekonomi mengalami overheating atau inflasi yang tinggi.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan fiskal yang tercermin dalam pengelolaan defisit dan utang pemerintah. Defisit anggaran yang terlalu besar dan berkepanjangan dapat mengancam stabilitas fiskal dan meningkatkan beban utang yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia menerapkan aturan fiskal (fiscal rule) yang membatasi besaran defisit anggaran terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB). Indonesia sendiri membatasi defisit anggaran maksimal 3% dari PDB sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, yang bertujuan menjaga kredibilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah upaya otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yang mencakup stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa (stabilitas harga/pengendalian inflasi) serta stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang negara lain (stabilitas nilai tukar). Warjiyo & Juhro (2020) menjelaskan bahwa pencapaian stabilitas harga merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena inflasi yang tinggi dan tidak terkendali akan menggerus daya beli masyarakat, mengganggu perencanaan ekonomi, dan menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi.

Instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia mencakup beberapa mekanisme yang saling melengkapi. Pertama, operasi pasar terbuka (open market operation) melalui jual beli Surat Berharga Negara atau Sertifikat Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas di pasar uang. Kedua, penetapan suku bunga acuan (BI Rate atau saat ini BI 7-Day Reverse Repo Rate) yang menjadi sinyal kebijakan moneter dan mempengaruhi suku bunga perbankan. Ketiga, penetapan rasio cadangan wajib minimum (reserve requirement) yang mengatur jumlah dana yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk cadangan. Keempat, himbuan moral (moral suasion) kepada pelaku pasar dan perbankan. Kelima, intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dalam implementasinya, Bank Indonesia menggunakan kerangka kerja Inflation Targeting Framework (ITF) sejak tahun 2005, di mana bank sentral menetapkan target inflasi yang ingin dicapai dan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai instrumen utama untuk mencapai target tersebut. Penelitian Zulaikah, (2024) menunjukkan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia. Ketika kebijakan fiskal bersifat ekspansif, kebijakan moneter perlu disesuaikan untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi. Sebaliknya, kebijakan moneter yang terlalu ketat tanpa dukungan kebijakan fiskal yang tepat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara berlebihan (Aswirah et al., 2024);(Dm, 2025).

Selain instrumen konvensional, Bank Indonesia juga mengembangkan berbagai instrumen inovatif untuk merespons dinamika ekonomi modern. Ini termasuk pengembangan sistem pembayaran digital, penerapan teknologi financial technology (fintech), dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Transformasi digital dalam sistem pembayaran tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi tetapi juga memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.

3. Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Hasibuan dan Santosa (2021) menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mencapai tujuan ekonomi nasional yang optimal. Koordinasi ini menjadi krusial karena kedua kebijakan tersebut saling mempengaruhi dan dapat menghasilkan efek yang saling memperkuat atau justru saling melemahkan. Kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa dukungan kebijakan moneter yang tepat dapat memicu inflasi berlebihan (*overheating*) karena peningkatan permintaan agregat tidak diimbangi dengan pengendalian likuiditas yang memadai. Di sisi lain, kebijakan moneter yang terlalu ketat melalui suku bunga tinggi tanpa stimulus fiskal yang memadai dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi swasta, dan meningkatkan beban bunga utang pemerintah.

Koordinasi antara otoritas fiskal (Kementerian Keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia) di Indonesia difasilitasi melalui berbagai forum formal seperti Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melakukan pemantauan risiko sistemik, dan merumuskan respons kebijakan terhadap krisis atau gejolak ekonomi. Dalam praktiknya, koordinasi ini meliputi pertukaran informasi dan data ekonomi secara real-time, sinkronisasi asumsi ekonomi makro dalam penyusunan kebijakan, dan penyusunan strategi bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa negara-negara dengan koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang baik cenderung lebih berhasil dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakselarasan antara kebijakan fiskal dan moneter dapat menciptakan *policy mix* yang tidak optimal dan bahkan kontraproduktif. Misalnya, jika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang sangat ekspansif sementara bank sentral menerapkan kebijakan moneter kontraktif untuk mengendalikan inflasi, maka efektivitas kedua kebijakan tersebut akan berkurang dan dapat menciptakan distorsi dalam perekonomian.

Dalam konteks perekonomian modern yang semakin kompleks dan terintegrasi dengan ekonomi global, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting. Gejolak eksternal seperti perubahan suku bunga global, fluktuasi harga komoditas, atau krisis keuangan di negara lain dapat memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi domestik. Respons yang terkoordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk meredam dampak negatif dari gejolak eksternal tersebut sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul. Selain itu, dalam menghadapi tantangan struktural seperti transformasi digital, transisi energi, dan perubahan iklim, koordinasi kebijakan jangka panjang antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 2024

Perekonomian Indonesia tahun 2024 menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan berbagai tantangan domestik. Berdasarkan data BPS (2024), pertumbuhan ekonomi triwulan II mencapai 5,11% (year-on-year), dengan konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 52% terhadap PDB nasional. Angka pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya dan menunjukkan momentum pemulihan ekonomi yang terus terjaga. Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian menjadi kontributor utama pertumbuhan, sementara sektor konstruksi dan jasa transportasi juga menunjukkan performa positif. Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif stabil meskipun menghadapi tekanan inflasi pada komoditas tertentu. Investasi baik dari pemerintah maupun swasta juga tumbuh positif, didorong oleh program pembangunan infrastruktur dan iklim investasi yang membaik.

Dari sisi inflasi, (Bank Indonesia, 2024) melaporkan tingkat inflasi tahunan sebesar 2,8%, masih dalam target sasaran $2,5 \pm 1\%$ yang menunjukkan keberhasilan pengendalian inflasi secara makro. Inflasi inti yang mencerminkan tren inflasi jangka panjang juga terkendali di kisaran 2,5%, menandakan tidak ada tekanan inflasi yang berlebihan dari sisi permintaan. Meskipun demikian, tekanan inflasi pangan tetap tinggi dan menjadi tantangan tersendiri, terutama pada komoditas beras yang naik hingga 15% akibat dampak El Niño dan gangguan produksi di beberapa sentra padi nasional. Inflasi pangan yang tinggi ini mempengaruhi inflasi kelompok volatile food yang mencapai 5,2%, jauh di atas inflasi inti. Kenaikan harga beras memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat berpendapatan rendah yang alokasi konsumsi pangannya tinggi, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang tepat dan cepat.

Faktor eksternal juga memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia menyebabkan ekspor Indonesia turun 8% dibanding tahun sebelumnya, khususnya untuk komoditas seperti batu bara, nikel, dan produk turunannya. Perlambatan ekonomi global secara umum, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat, juga mempengaruhi permintaan ekspor Indonesia. Harga komoditas global yang fluktuatif, terutama batu bara, nikel, dan CPO (Crude Palm Oil), turut mempengaruhi kinerja ekspor dan penerimaan devisa negara (World Bank, 2024). Di sisi lain, kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh bank sentral negara-negara maju untuk mengendalikan inflasi domestik mereka menyebabkan aliran modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah hingga Rp15.700 per USD pada beberapa periode, memberikan tekanan pada sektor impor terutama untuk bahan baku dan barang modal, serta meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri yang denominasi dalam valuta asing.

Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia masih mencatat surplus meskipun mengecil dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ekspor yang lebih besar

dibanding penurunan impor menyebabkan surplus perdagangan menyempit. Hal ini mempengaruhi neraca pembayaran dan cadangan devisa, meskipun cadangan devisa Indonesia masih berada di level yang cukup untuk membiayai impor dan pembayaran utang luar negeri (Adhitya, 2021). Sektor pariwisata menunjukkan pemulihan yang menggembirakan dengan jumlah wisatawan mancanegara yang terus meningkat, memberikan kontribusi positif terhadap neraca jasa dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 5,3%, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, namun tantangan pengangguran terbuka terutama di kalangan pemuda dan lulusan perguruan tinggi masih memerlukan perhatian khusus.

2. Implementasi Kebijakan Fiskal

Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur melalui program APBN untuk Transformasi Ekonomi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang masih memerlukan stimulus. Kementerian Keuangan RI, (2024) mencatat bahwa pemerintah berhasil menjaga defisit anggaran di bawah 3% PDB, tepatnya sekitar 2,7%, meskipun meningkatkan belanja produktif untuk infrastruktur dan program sosial. Pencapaian ini menunjukkan disiplin fiskal yang baik dan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang. Total belanja negara difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja difokuskan pada beberapa prioritas strategis yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang. Pertama, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu hambatan daya saing ekonomi Indonesia, dan membuka akses ekonomi ke daerah-daerah terpencil. Program pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur digital terus dilanjutkan dengan alokasi anggaran yang signifikan. Kedua, program perlindungan sosial melalui bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk kelompok rentan, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi yang tepat sasaran, dan berbagai bantuan sosial lainnya diperluas cakupannya untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dari dampak kenaikan harga (Adelia Gusfira et al., 2025). Program perlindungan sosial ini berfungsi sebagai automatic stabilizer yang membantu menjaga konsumsi domestik ketika terjadi gejolak ekonomi. Ketiga, insentif fiskal bagi sektor industri untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, termasuk tax holiday dan tax allowance untuk industri prioritas, insentif untuk investasi di sektor manufaktur padat karya, serta dukungan untuk pengembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau (Nesya Zuhrah et al., 2024).

Dari sisi penerimaan, pemerintah melakukan reformasi perpajakan yang komprehensif dengan memperluas basis pajak melalui peningkatan cakupan wajib pajak dan formalisasi sektor informal, meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi digital, dan penguatan law enforcement terhadap pengemplang pajak. Rasio pajak terhadap PDB berangsur meningkat meskipun belum mencapai target optimal sekitar 12-13% yang diharapkan

untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Kebijakan insentif pajak juga diberikan secara selektif untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan, seperti industri padat karya, industri berorientasi ekspor, dan industri berbasis teknologi (Halawa et al., 2025). Pemerintah juga terus melakukan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam dengan menerapkan skema royalti yang lebih menguntungkan negara.

Kebijakan belanja daerah juga mendapat perhatian khusus dengan alokasi dana transfer ke daerah yang meningkat untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, sementara Dana Desa terus diperkuat untuk pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Desentralisasi fiskal ini penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah yang masih menjadi tantangan struktural Indonesia.

3. Implementasi Kebijakan Moneter

Bank Indonesia, (2024) menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar sebagai prioritas utama mengingat tekanan eksternal yang cukup besar. Suku bunga acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate) dipertahankan pada level yang mendukung pertumbuhan ekonomi namun tetap waspada terhadap risiko inflasi dan stabilitas nilai tukar. Keputusan untuk mempertahankan suku bunga ini didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi masih terkendali dalam target, pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan likuiditas yang memadai, dan stabilitas nilai tukar dapat dijaga melalui instrumen lain seperti intervensi pasar dan pengelolaan cadangan devisa. Stance kebijakan moneter yang akomodatif ini juga mempertimbangkan kebijakan moneter global, khususnya arah kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat yang mempengaruhi aliran modal dan nilai tukar.

Instrumen yang digunakan Bank Indonesia meliputi beberapa mekanisme yang terintegrasi. Pertama, operasi pasar terbuka untuk mengelola likuiditas di pasar uang dengan melakukan jual beli Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Operasi ini dilakukan secara aktif dan fleksibel sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan dan kebutuhan stabilisasi moneter. Kedua, intervensi di pasar valuta asing baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menstabilkan rupiah dan mencegah volatilitas yang berlebihan. Bank Indonesia melakukan triple intervention di pasar spot, pasar forward, dan pasar domestik non-deliverable forward (DNDF) untuk memastikan efektivitas intervensi. Ketiga, relaksasi regulasi untuk mendorong penyaluran kredit perbankan kepada UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, termasuk pelonggaran loan-to-value ratio untuk kredit konsumtif produktif dan kemudahan dalam restrukturisasi kredit. Keempat, penguatan koordinasi dengan pemerintah melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk memastikan sinergi kebijakan dan pencegahan risiko sistemik.

Bank Indonesia juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital dan peningkatan efisiensi transaksi ekonomi.

Program Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) diperluas penggunaannya hingga ke pelosok daerah untuk meningkatkan inklusi keuangan digital. Transaksi digital tumbuh signifikan dengan nilai transaksi yang mencapai ratusan triliun rupiah per bulan, berkontribusi sekitar 5,6% terhadap PDB nasional. Selain itu, pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional terus didorong melalui penerbitan sukuk, pengembangan perbankan syariah, dan harmonisasi regulasi keuangan syariah. Bank Indonesia juga aktif dalam mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau rupiah digital sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi finansial global (Hidayat Rumatiga, 2024).

Dari sisi makroprudensial, Bank Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) perbankan dijaga di atas standar minimum untuk memastikan ketahanan perbankan terhadap gejolak. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan) dipantau ketat dan berada di level yang terkendali sekitar 2,5%. Kebijakan countercyclical capital buffer diterapkan untuk mencegah pertumbuhan kredit yang berlebihan pada saat boom ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat surveillance terhadap risiko sistemik, termasuk risiko dari shadow banking dan fintech yang pertumbuhannya sangat pesat. Stress test terhadap sistem perbankan dilakukan secara berkala untuk memastikan ketahanan sistem keuangan terhadap berbagai skenario gejolak ekonomi.

4. Studi Kasus: Penanganan Inflasi Pangan

Kenaikan harga beras menjadi tantangan serius di awal tahun 2024 yang mengancam daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Harga beras meningkat tajam hingga Rp14.500 per kilogram di tingkat konsumen, bahkan di beberapa daerah mencapai Rp16.000 per kilogram, akibat penurunan produksi nasional dan gangguan distribusi. Kementerian Perdagangan RI (2024) mencatat bahwa fenomena El Niño menyebabkan gagal panen di beberapa sentra produksi padi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan penurunan produksi mencapai 10-15% dibanding tahun normal. Musim kemarau yang berkepanjangan dan serangan hama juga memperparah kondisi produksi. Sementara itu, biaya logistik meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar dan gangguan distribusi, sehingga margin distribusi menjadi lebih tinggi dan harga di tingkat konsumen melonjak.

Kenaikan harga beras ini memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, beras memiliki bobot yang signifikan dalam perhitungan inflasi, sehingga kenaikan harganya langsung mendorong inflasi umum. Masyarakat berpendapatan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi pangan merasakan dampak paling berat dengan menurunnya daya beli dan kesejahteraan mereka. Ancaman terhadap ketahanan pangan nasional juga menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya beras dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Pemerintah merespons secara cepat dan terkoordinasi dengan meluncurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola oleh Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Program ini mencakup beberapa strategi yang komprehensif. Pertama, operasi pasar murah dengan menjual beras dari cadangan pemerintah dengan harga subsidi di berbagai lokasi strategis, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kenaikan harga yang tinggi. Operasi pasar ini dilakukan secara masif dan terkoordinasi untuk memberikan efek penurunan harga yang signifikan. Kedua, impor beras dalam jumlah terbatas sekitar 500.000 ton untuk menambah pasokan domestik dan menekan harga, dengan tetap memperhatikan kepentingan petani domestik agar tidak dirugikan oleh impor yang berlebihan. Impor dilakukan secara selektif dari negara-negara yang memiliki surplus beras dengan kualitas yang sesuai standar. Ketiga, distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) kepada kelompok sasaran melalui program Bantuan Pangan Pemerintah dan masyarakat rentan lainnya untuk memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap pangan pokok. Keempat, perbaikan sistem distribusi dan logistik untuk mengurangi disparitas harga antardaerah dan memastikan pasokan beras tersedia merata di seluruh wilayah.

Evaluasi terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menunjukkan bahwa program ini masih menghadapi beberapa kendala dalam menjaga daya beli masyarakat miskin. Permasalahan utamanya adalah ketidaktepatan sasaran, dimana sebagian orang yang menerima bantuan justru bukan dari keluarga miskin, namun dari kelompok yang cukup mampu. Sementara itu, keluarga miskin yang benar-benar memerlukan tetap belum terdaftar. Penelitian oleh Putri Rahayu dan Hanik Fitriani (2023) menemukan bahwa penyebab utamanya adalah penggunaan data yang tidak diperbarui. Akibatnya, keluarga yang sudah membaik secara ekonomi tetap menerima BPNT, sedangkan keluarga baru yang miskin tidak terdaftar (Rahayu & Hanik Fitriani, 2023). Hal ini menyebabkan dua dampak: pertama, efektivitas BPNT dalam mengurangi dampak inflasi pangan menjadi kurang baik; kedua, muncul rasa cemburuan sosial di tingkat masyarakat yang bisa merusak kepercayaan terhadap program tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui data secara rutin dan menerapkan mekanisme validasi yang lebih tepat agar BPNT dapat benar-benar menjadi bantuan yang tepat sasaran dan efektif saat harga pangan sedang naik.

Selain intervensi pasar, program BPNT diperluas cakupannya untuk melindungi daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Jumlah penerima manfaat ditambah dari sekitar 15 juta keluarga menjadi 18 juta keluarga, dengan nilai bantuan yang juga disesuaikan dengan tingkat inflasi pangan. BPNT memberikan fleksibilitas kepada penerima untuk membeli bahan pangan sesuai kebutuhan mereka di warung atau toko yang bekerja sama dengan program. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga diperkuat untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran, serta untuk mengidentifikasi dan menangani masalah distribusi yang mungkin timbul di tingkat lokal.

Evaluasi menunjukkan bahwa intervensi pemerintah berhasil menstabilkan harga beras dalam waktu sekitar tiga bulan. Harga turun bertahap ke kisaran

Rp13.000 per kilogram di tingkat konsumen, mendekati harga sebelum terjadi lonjakan. Di beberapa daerah dengan operasi pasar yang intensif, harga bahkan turun hingga Rp12.500 per kilogram. Program ini membuktikan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal (subsidi dan bantuan sosial) dengan kebijakan distribusi pangan dan intervensi pasar. Keberhasilan program ini juga menunjukkan efektivitas cadangan beras pemerintah sebagai instrumen stabilisasi harga dan pentingnya sistem early warning untuk mengantisipasi gangguan produksi (Widiriani, 2021). Namun, program ini juga menimbulkan beban fiskal yang cukup besar, sehingga ke depan diperlukan strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi ketergantungan pada intervensi pemerintah.

5. Tantangan dan Prospek

Ketimpangan perekonomian antar daerah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi, tetapi juga karena perbedaan dalam tingkat pembangunan yang masih sangat jelas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan antar provinsi cenderung bertahan karena pertumbuhan ekonomi berakhir di daerah yang memiliki infrastruktur dan akses yang baik, sementara daerah lainnya masih tertinggal. Menurut penelitian Yetlina Lania dan rekan-rekannya (2025), ketimpangan daerah di Indonesia masih dalam tingkat yang mengkhawatirkan, di mana provinsi seperti Papua Barat memiliki Indeks Williamson yang tinggi, yakni sebesar 1,46, sedangkan daerah seperti Kalimantan Utara memiliki angka yang jauh lebih rendah, yaitu 0,17 (Syarwani Canon, Yetlina Lania, 2025). Perbedaan yang sangat besar ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian nasional belum tersebar secara merata, sehingga daerah dengan infrastruktur yang kuat dan kemampuan keuangan tinggi terus menarik lebih banyak investasi dan tenaga kerja dibandingkan daerah dengan kondisi pembangunan yang kurang baik. Dalam situasi ini, tantangan dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi tidak hanya terletak pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga pada bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebih adil.

Meskipun menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan. Ketimpangan ekonomi antarwilayah dan kelompok masyarakat masih tinggi, dengan konsentrasi ekonomi yang masih berpusat di Pulau Jawa sementara daerah-daerah di luar Jawa, terutama Indonesia Timur, masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar. Ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat yang tercermin dalam koefisien Gini yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan belum merata dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap volatilitas harga global dan perubahan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama. Penurunan harga komoditas global dapat langsung mempengaruhi penerimaan ekspor, pendapatan fiskal, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu,

agenda hilirisasi industri yang telah dimulai perlu dipercepat dan diperluas untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Namun, hilirisasi industri memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, serta waktu yang tidak singkat untuk mencapai hasil yang signifikan.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih relatif rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini berkaitan dengan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang masih perlu ditingkatkan, kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta tingkat adopsi teknologi yang masih rendah di banyak sektor. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri modern menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, transformasi digital dalam berbagai sektor ekonomi memerlukan peningkatan literasi digital masyarakat dan ketersediaan infrastruktur digital yang merata.

Tantangan perubahan iklim juga semakin nyata dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, seperti yang terlihat dari dampak El Niño terhadap produksi pangan. Cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, kenaikan permukaan laut yang mengancam daerah pesisir, dan perubahan pola curah hujan memerlukan adaptasi dan mitigasi yang komprehensif. Sektor pertanian yang sangat bergantung pada iklim memerlukan transformasi menuju pertanian yang lebih resilient dan berkelanjutan melalui adopsi teknologi, diversifikasi tanaman, dan perbaikan infrastruktur irigasi.

Ke depan, pemerintah perlu melanjutkan agenda transformasi ekonomi melalui beberapa strategi utama. Pertama, percepatan hilirisasi industri terutama untuk komoditas unggulan seperti nikel, kelapa sawit, dan batu bara dengan memberikan insentif yang menarik bagi investor dan membangun ekosistem industri yang lengkap. Kedua, pengembangan ekonomi digital dengan memperluas infrastruktur digital, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan menciptakan regulasi yang kondusif bagi pertumbuhan startup dan industri teknologi. Ketiga, transisi energi hijau menuju ekonomi rendah karbon dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, mengembangkan kendaraan listrik, dan mendorong industri hijau. Keempat, penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap gejolak ekonomi untuk melindungi kelompok rentan dan mengurangi ketimpangan. Kelima, pemerataan pembangunan antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, desentralisasi ekonomi, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Transformasi-transformati ini memerlukan komitmen jangka panjang, investasi yang besar, dan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan terhadap implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Perekonomian Indonesia tahun 2024 menunjukkan ketahanan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% yang didorong oleh konsumsi domestik, investasi, dan ekspor. Inflasi berhasil dikendalikan pada level 2,8%, masih dalam target sasaran Bank Indonesia $2,5 \pm 1\%$, menunjukkan efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tekanan baik eksternal maupun internal. Tekanan eksternal berasal dari perlambatan ekonomi global terutama Tiongkok sebagai mitra dagang utama, fluktuasi harga komoditas global, dan volatilitas nilai tukar yang mencapai Rp15.700 per USD. Tekanan internal terutama berasal dari inflasi pangan yang tinggi akibat dampak El Niño terhadap produksi pertanian, khususnya beras yang mengalami kenaikan harga hingga 15%.

Implementasi kebijakan fiskal melalui program APBN untuk Transformasi Ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan terukur. Pemerintah berhasil menjaga defisit anggaran di bawah 3% PDB, tepatnya sekitar 2,7%, sambil meningkatkan belanja produktif untuk infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik, serta memperluas program perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan dari dampak kenaikan harga. Kebijakan fiskal yang ekspansif namun terukur ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dari sisi penerimaan, reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya rasio pajak terhadap PDB, meskipun masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Insentif fiskal yang diberikan secara selektif untuk sektor prioritas seperti industri manufaktur dan ekonomi digital juga memberikan kontribusi terhadap transformasi struktur ekonomi menuju ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Kebijakan moneter Bank Indonesia yang akomodatif dengan tetap waspada terhadap risiko memberikan dukungan penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga acuan dipertahankan pada level yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan secara aktif dan terkoordinasi. Kebijakan makroprudensial yang hati-hati memastikan stabilitas sistem keuangan terjaga dengan baik, tercermin dari rasio kecukupan modal perbankan yang kuat dan rasio kredit bermasalah yang terkendali. Dorongan terhadap digitalisasi sistem pembayaran dan pengembangan ekonomi syariah juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan. Koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan terbukti efektif dalam merumuskan respons kebijakan yang terkoordinasi terhadap tantangan ekonomi.

Studi kasus penanganan inflasi pangan, khususnya kenaikan harga beras, menunjukkan efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dalam

menstabilkan harga dan melindungi daya beli masyarakat. Melalui kombinasi operasi pasar murah, impor terbatas, distribusi cadangan beras pemerintah, dan perluasan program Bantuan Pangan Non-Tunai, pemerintah berhasil menurunkan harga beras dari Rp14.500 per kilogram menjadi sekitar Rp13.000 per kilogram dalam waktu tiga bulan. Keberhasilan ini membuktikan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial dengan kebijakan distribusi pangan dan intervensi pasar. Program ini juga menunjukkan pentingnya cadangan pangan strategis dan sistem early warning dalam mengantisipasi dan merespons gejolak harga pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan stabilitas sosial.

Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter terbukti menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan. Koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memastikan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif tidak memicu inflasi yang berlebihan, sementara kebijakan moneter yang akomodatif tidak menciptakan risiko terhadap stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berfungsi efektif sebagai wadah koordinasi kebijakan dan berbagi informasi antarinstansi. Namun, meskipun capaian-capaian positif tersebut, tantangan struktural seperti ketimpangan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok masyarakat, ketergantungan pada ekspor komoditas primer, produktivitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, dan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian masih memerlukan perhatian serius dan penanganan komprehensif dalam jangka panjang.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Pertama, pemerintah perlu melanjutkan dan mempercepat agenda hilirisasi industri dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer yang rentan terhadap volatilitas harga global. Hilirisasi industri tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk ekspor tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan mendorong transfer teknologi. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan insentif yang menarik, membangun infrastruktur pendukung yang memadai, dan menciptakan regulasi yang kondusif bagi investasi di sektor manufaktur dan industri pengolahan.

Kedua, penguatan sistem ketahanan pangan nasional harus menjadi prioritas mengingat pentingnya pangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Investasi infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian pasca-panen. Adopsi teknologi pertanian modern seperti precision farming, penggunaan benih unggul, dan mekanisasi pertanian harus dipercepat melalui penyuluhan dan bantuan kepada petani. Pengembangan cadangan pangan strategis yang memadai dan sistem distribusi yang efisien juga penting untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan gangguan produksi. Selain itu, diversifikasi pangan pokok dan promosi konsumsi pangan lokal non-beras perlu didorong untuk mengurangi tekanan terhadap produksi beras.

Ketiga, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu terus diperkuat dan dilembagakan dengan lebih baik. Forum koordinasi yang sudah ada perlu diperkuat dengan mekanisme berbagi data secara real-time, sinkronisasi asumsi ekonomi makro dalam penyusunan kebijakan, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi. Penggunaan teknologi informasi untuk pertukaran data dan analisis bersama dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons kebijakan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, transparansi dan komunikasi publik yang baik tentang arah kebijakan ekonomi penting untuk mengelola ekspektasi masyarakat dan pelaku pasar.

Keempat, transformasi ekonomi digital dan transisi energi hijau harus dipercepat sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur digital termasuk jaringan internet broadband yang merata, data center, dan sistem pembayaran digital perlu diprioritaskan untuk mendukung ekonomi digital. Peningkatan literasi digital masyarakat dan pengembangan talenta digital melalui pendidikan dan pelatihan juga penting untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Untuk transisi energi, pemerintah perlu memberikan insentif yang menarik bagi investasi di energi terbarukan, mengembangkan industri kendaraan listrik dan baterai, serta menciptakan regulasi yang mendorong efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon.

Kelima, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji dampak jangka panjang kebijakan fiskal dan moneter terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih mendalam. Penelitian dengan menggunakan data mikro dan pendekatan ekonometrika dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang channel transmisi kebijakan dan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat. Evaluasi efektivitas program-program perlindungan sosial dan subsidi juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, kajian tentang dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan strategi adaptasi yang cost-effective perlu dilakukan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Penelitian-penelitian ini akan memberikan basis empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan inklusif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II Tahun 2024*. Jakarta: BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2024*. Jakarta: Bank Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id>
- Fitriani, S., & Nurdin, R. (2022). Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 45-62. <https://doi.org/10.21002/jepi.v22i1.1234>

- Haryanto, T. P. (2023). Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 7(2), 112-130. <https://doi.org/10.31685/kek.v7i2.2156>
- Hasibuan, A. R., & Santosa, B. (2021). Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk Stabilitas Makroekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(3), 289-306. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.745>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN Kita: Realisasi dan Outlook Ekonomi Nasional 2024. Jakarta: Kemenkeu RI. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Perkembangan Harga Pangan Nasional Semester I 2024. Jakarta: Kemendag RI. Diakses dari <https://www.kemendag.go.id>
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2020). *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Navigating Global Uncertainty*. Washington, DC: The World Bank. Diakses dari <https://www.worldbank.org/indonesia>
- Adelia Gusfira, Hasanatun Fitri, & Ahmad Wahyudi zein. (2025). Dampak Subsidi Energi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 13–22. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.295>
- Adhitya, B. (2021). Analisis Determinan Cadangan Devisa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 184. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1237>
- Aswirah, A., Arfah, A., & Alam, S. (2024). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 13(2), 180–186. <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i2.4642>
- Bank Indonesia. (2024). Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2025. Bank Indonesia. Bank Indonesia, 1–16.
- BPS. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>
- Dm, R. (2025). Peran Financial Technology (FinTech) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia The Role of Financial Technology (FinTech) in Increasing Financial Inclusion in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 928–936. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>

- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Fadli. (2021). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 43–53.
- Hidayat Rumatiga. (2024). Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 24–32. <https://doi.org/10.69768/ja.v2i1.24>
- Kementerian, Keuangan, & RI. (2024). Realisasi dan Outlook Ekonomi Nasional 2024. *ペインクリニック学会治療指針 2*, 1–9.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles Of Economics*, Ninth Edition. In Cengage.
- Nesya Zuhrah, Reza Umamah, Heikelindra Kurniawan, & Wirawan Firman Nurcahya. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>
- Rahayu, P., & Hanik Fitriani. (2023). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 146–155. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.1758>
- Saefudin. (2023). Strategi Perencanaan Menghadapi Krisis Pangan dan El Nino. *Warta BSIP Perkebunan*, 1(3), 21–30.
- Sudha, R. (2017). Research Approaches and Designs. *Research and Biostatistics for Nurses*, 89–89. https://doi.org/10.5005/jp/books/13016_6
- Sudirman, A. (2017). The World Trade Organization (WTO) Rules and Regulation: A Threat or Promise to Indonesia's Agricultural Policy? *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(1), 6. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n1.2>
- Syarwani Canon, Yetlina Lania, B. R. P. (2025). Analisis Ketimpangan Regional Antar Provinsi Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. 5(2), 265–273.
- Widiriani, R. (2021). Early Warning System (EWS) Ketahanan Pangan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, September.
- Zulaikah. (2024). Pendahuluan Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu pilar utama yang mendukung kesejahteraan ekonomi sebuah negara . Stabilitas ini ditandai dengan kondisi-kondisi yang ideal , seperti inflasi yang terkendali , tingkat pengangguran yang rendah , per. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 95–108.